

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

SINERGITAS PENGAMANAN PERAIRAN (SIPAMER) GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA DI KALIMANTAN TIMUR



OLEH :

NAMA: BAHRIL,S.H.

NDH : 04

**Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXVIII Tahun 2023**

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
BANDUNG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BHRIL, S.H

NRP : 75020642

NDH : 04

Instansi : DIT POLAIRUD POLDA KALTIM

Jabatan : KABAG BINOPSNAL

Dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Proyek Perubahan yang berjudul:

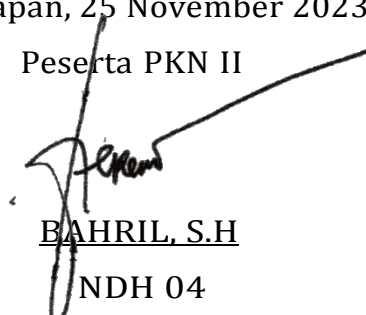
SINERGITAS PENGAMANAN PERAIRAN (SIPAMER) GUNA Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Adalah karya tulisan saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain dan bahwa Rancangan Proyek Perubahan yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Rancangan Proyek Perubahan ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Balikpapan, 25 November 2023

Peserta PKN II



BAHRIL, S.H

NDH 04

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : BAHRIL, S.H
NRP : 75020642
NDH : 04
Instansi : DITPOLAIRUD POLDA KALTIM
Jabatan : KABAG BINOPSNAL
Judul : ***SINERGITAS PENGAMANAN PERAIRAN (SIPAMER)***
Proyek ***GUNA Mendukung Pembangunan Ibu Kota***
Perubahan ***NEGARA DI KALIMANTAN TIMUR***

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Implementasi Proyek
Perubahan yang diselenggarakan pada tanggal November 2023

Balikpapan, November 2023

Mentor



KOMBES POL PAHALA H.M PANJAITAN, S.I.K., M.Si.
DIRPOLAIRUD POLDA KALTIM

Coach



BURDAN ALI JUNJUNAN, S.H., M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN

**SINERGITAS PENGAMANAN PERAIRAN (SIPAMER) GUNA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA DI
KALIMANTAN TIMUR**

DISUSUN OLEH:

NAMA : BHRIL, S.H

NO PESERTA : 20230707012004

INSTANSI : DITPOLAIRUD POLDA KALTIM

JABATAN : KABAG BINOPSNAL

**Telah dipresentasikan pada evaluasi implementasi Proyek Perubahan
yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2023.**

**Mengetahui,
KAPUSDIKMIN**

**Drs. TAUFIK SUPRIYADI
KOMBES POL NRP 65110550**

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : KOMBES POL PAHALA H.M PANJAITAN, S.I.K., M.Si

NRP 70010196

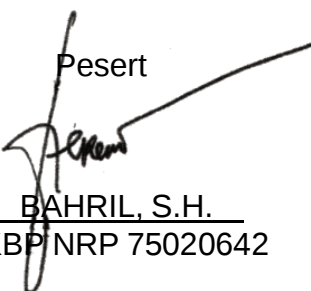
Jabatan : DIRPOLAIRUD POLDA KALTIM

Nama : AKBPBAHRIL, SH

NRP 75020642

Jabatan : KABAG BINOPSNAL DITPOLAIRUD POLDA KALTIM

Berkomitmen akan melanjutkan Proyek Perubahan tentang Sinergitas Pengamanan Perairan (SIPAMER) guna mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Pesert

BAHRIL, S.H.
AKBP NRP 75020642

Balikpapan, 20 November 2023
Mentor


PAHALA H.M. PANJAITAN, S.I.K., M.Si.
KOMBES POL NRP 70010196

Abstraksi

Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, telah mengambil langkah besar dengan merencanakan pembangunan ibu kota negara yang baru. Pembangunan ibu kota baru ini menimbulkan tantangan baru terkait keamanan perairan, mengingat lokasinya yang terletak di wilayah pesisir dan memiliki perairan yang strategis. Dalam konteks ini, proyek perubahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merancang sinergitas pengamanan perairan yang akan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Proyek ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk otoritas maritim, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk merumuskan rencana yang efektif dalam mengatasi potensi ancaman keamanan perairan, seperti laka laut, dan tindak pidana yang terjadi di perairan Ibu Kota Negara. Selain itu, proyek ini juga akan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari strategi pengamanan yang diusulkan.

Melalui pendekatan kolaboratif, proyek ini bertujuan untuk menciptakan sinergi diantara semua pemangku kepentingan yang terlibat, memastikan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan strategi pengamanan perairan, serta mempromosikan penggunaan sumber daya yang efisien. Proyek ini juga akan mempertimbangkan teknologi digitalisasi, termasuk sistem pemantauan dan komunikasi yang canggih, untuk meningkatkan efektivitas pengamanan perairan.

Hasil dari proyek ini diharapkan akan berkontribusi pada pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, serta dapat menjadi model bagi wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengamanan perairan mereka.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala ciptaan-Nya yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua dan atas perkenan-Nya, Alhamdulillah Laporan Akhir Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII ini dapat tersusun. Laporan Akhir Proyek Perubahan ini menyampaikan kemajuan dan hasil dari Implementasi proyek perubahan yang kami tawarkan sebagai peserta Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

Adapun judul Proyek Perubahan yang kami gagas adalah **“SINERGITAS PENGAMANAN PERAIRAN (SIPAMER) GUNA Mendukung PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.”**

Kalimantan Timur, dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, tetapi juga sebagai rumah bagi sumber daya alam yang melimpah dan keindahan alam yang menakjubkan, wilayah ini memiliki potensi luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Namun, apa yang membuat Kalimantan Timur menjadi sorotan dunia adalah rencana ambisiusnya untuk menjadi tuan rumah Ibu Kota Negara yang baru.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengumumkan niatnya untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Keputusan ini dipandang sebagai tonggak sejarah yang penting, yang akan membawa perubahan besar dalam langkah politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan Ibu Kota Negara yang baru ini, yang berada di tengah wilayah pesisir Kalimantan Timur, adalah proyek monumental yang akan membawa berbagai dampak positif. Namun, di balik Visi besar ini, terdapat serangkaian tantangan yang memerlukan perhatian serius, salah satunya adalah pengamanan perairan.

Pengamanan perairan adalah aspek kunci yang harus diperhatikan dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang baru. Wilayah pesisir Kalimantan

Timur memiliki perairan yang sangat strategis, dan keamanan di sekitar perairan ini menjadi kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta melindungi sumber daya alam yang berharga. Dalam konteks ini, proyek perubahan dengan judul " Sinergitas Pengamanan Perairan (Sipamer) Guna Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur " menjadi esensial untuk memastikan keberhasilan dan kelangsungan pembangunan ini.

Proyek ini tidak hanya tentang mengamankan perairan, tetapi juga tentang memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara baru ini dapat memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat Kalimantan Timur dan menjaga kelestarian lingkungan. Proyek ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk otoritas maritime dan lembaga-lembaga terkait, dalam upaya untuk merumuskan rencana strategis yang efektif.

Dalam tulisan ini, kami akan menguraikan berbagai aspek yang terkait dengan proyek perubahan ini. Kami akan menjelajahi tantangan pengamanan perairan yang dihadapi, strategi kolaborasi yang digunakan untuk mengatasinya, serta dampak yang diharapkan dari penerapan strategi ini terhadap pembangunan ibu kota negara baru Kalimantan Timur. Kami akan melihat bagaimana kolaborasi dapat menjadi kunci untuk menjaga keamanan perairan sambil mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Kombes Pol Pahala H.M Panjaitan, SIK, MSI selaku mentor dan Bapak Burdan Ali Junjuran. S.H, MSi selaku coach yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta kepada Tim Efektif yang telah membantu sehingga pelaksanaan Proyek Perubahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Balikpapan, November 2023

PROJECT LEADER

AKBP BAHRIL, SH

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian.....	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Komitmen Melanjutkan Proyek Perubahan	v
Abstrak	vi
Kata pengantar	vii
DAFTAR ISI.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
a. Deskripsi umum	3
b. Tujuan.....	5
c. Manfaat	6
d. Visi dan misi.....	8
e. Struktur Organisasi	8
2. Output dan Outcome Proyek Perubahan	9
3. Ruang Lingkup	10
II. IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN	14
1. Capaian Hasil Implementasi Proyek Perubahan.....	14
2. Deskripsi Kepemimpinan Strategis	21
3. Implementasi Strategi Komunikasi	23
a. Dukungan Stakeholder	23
b. Diseminasi & Publikasi Proyek perubahan	26
c. Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi	28
4. Keberlanjutan Proyek Perubahan.....	29
a. Dukungan Mentor Untuk Keberlanjutan Proper	31
b. Rencana implementasi jangka menengah dan panjang	33
5. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran	33
Implementasi Strategi Pengembangan Kompetensi Tim dan Potensi Diri.....	34
6. Pemanfaatan Mata Pelatihan Pilihan Untuk Implementasi Proper .	35
Deskripsi pemanfaatan darta mata pelatihan pilihan untuk pelaksanaan proper	35

III. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan.....	39
2. Saran	39

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, merupakan proyek monumental yang menjadi fokus perhatian nasional dan internasional. Wilayah ini dipilih sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara baru Indonesia sebagai respons terhadap masalah serius yang telah lama menghantui Jakarta, ibu kota saat ini, seperti kemacetan lalu lintas yang parah, tingkat polusi yang tinggi, dan risiko bencana alam yang tinggi. Proyek IKN dirancang untuk menjadi solusi bagi tantangan-tantangan tersebut dan menawarkan peluang besar bagi pertumbuhan, pembangunan, dan perubahan sosial di wilayah Kalimantan Timur.

Salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam konteks pembangunan IKN adalah pergerakan kapal yang semakin meningkat di perairan sekitar IKN. Dalam periode Januari hingga Juli, data mencatat jumlah lalu lintas kapal yang signifikan di wilayah ini, dengan total 224 kapal yang lalu-lalang. Sebagai proyek pembangunan berlanjut, diperkirakan jumlah kapal ini akan terus bertambah seiring dengan masuknya berbagai investasi swasta yang turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Meningkatnya aktivitas kapal ini mencerminkan kehidupan ekonomi yang semakin berkembang di wilayah IKN dan potensi besar dalam sektor transportasi dan logistik.

Namun, dampak dari peningkatan pergerakan kapal ini menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pertama, peningkatan lalu lintas kapal ini dapat menyebabkan potensi kepadatan lalu lintas laut di wilayah perairan IKN. Alur pelayaran yang lebih sibuk meningkatkan risiko konflik dan insiden di perairan, yang dapat menghambat kelancaran pelayaran dan bahkan mengakibatkan kecelakaan laut yang serius. Keamanan navigasi menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

Selain itu, peningkatan pergerakan kapal juga meningkatkan risiko kecelakaan laut yang dapat memengaruhi kapal yang mengangkut logistik dan penumpang ke IKN. Kecelakaan laut dapat mengakibatkan kerugian materiil yang signifikan, merusak lingkungan laut, dan mengancam keselamatan manusia. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah kecelakaan laut dan meresponsnya dengan cepat menjadi penting.

Selain potensi kepadatan dan risiko kecelakaan, peningkatan pergerakan kapal juga menciptakan peluang bagi tindak pidana di perairan IKN. Kapal-kapal ini menjadi sasaran potensial untuk berbagai jenis tindak pidana seperti pencurian, penyelundupan, dan pelanggaran pelayaran. Keberadaan sejumlah besar kapal yang beroperasi di wilayah ini menambah kompleksitas dalam pengawasan dan penegakan hukum di perairan IKN.

Sebagai tanggapan terhadap sejumlah tantangan ini, proyek perubahan ini diinisiasi. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan sinergitas patroli di wilayah perairan IKN dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkendali bagi kapal-kapal yang melintasi wilayah ini. Dengan demikian, proyek perubahan ini ditujukan untuk memastikan bahwa aktivitas kapal yang lalu-lalang di wilayah perairan IKN berjalan dengan aman dan lancar. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pembangunan Ibu Kota Nusantara serta keberlanjutan operasi kapal dan keselamatan manusia di perairan IKN.

Data Kapal yang memasuki perairan IKN sebagai berikut :

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang tren pergerakan kapal selama periode Januari hingga Oktober tahun 2023, berikut :

NO	BULAN	JUMLAH	PRESENTASI
1	JANUARI	26 KAPAL	-
2	FEBRUARI	6 KAPAL	TURUN 70 %
3	MARET	37 KAPAL	NAIK 51.66 %
4	APRIL	26 KAPAL	TURUN 29.73 %
5	MEI	40 KAPAL	NAIK 53.85 %
6	JUNI	40 KAPAL	-
7	JULI	49 KAPAL	NAIK 22.05 %
8	AGUSTUS	75 KAPAL	NAIK 53.06 %
9	SEPTEMBER	66 KAPAL	TURUN 13.63 %
10	OKTOBER	91 KAPAL	NAIK 27.47 %

Data ini mencerminkan fluktuasi dalam aktivitas kapal selama periode tersebut, dengan beberapa bulan mengalami peningkatan yang signifikan sementara yang lain relatif stabil dan ada yang mengalami penurunan. Peningkatan yang paling mencolok terjadi pada bulan Maret, Juli dan Agustus serta Oktober yang dapat dihubungkan dengan perkembangan pembangunan IKN dan masuknya investasi swasta. Sementara itu, bulan Februari dan September menyaksikan penurunan yang signifikan dalam jumlah kapal yang melintas, yang mungkin dikaitkan dengan faktor musiman atau variabilitas ekonomi.

Dalam rangka mengatasi kompleksitas peningkatan pergerakan kapal dan memastikan kelancaran dan keamanan perairan IKN, proyek perubahan ini akan berfokus pada pengembangan sinergitas patroli yang lebih efektif, peningkatan pemantauan lalu lintas kapal, serta respons yang lebih cepat terhadap insiden atau ancaman keamanan. Sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk otoritas maritim, akan menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan.

a. Deskripsi Umum

Proyek perubahan ini dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan sinergitas patroli di wilayah perairan Ibu Kota Negara (IKN). Keputusan ini merupakan respons terhadap proyek ambisius pembangunan IKN yang sedang berlangsung, yang akan

mengalami peningkatan signifikan dalam pengangkutan logistik dan lalu lintas kapal. Dalam konteks ini, upaya pengamanan perairan menjadi semakin krusial, mengingat perairan di sekitar IKN memiliki peran yang sangat strategis.

Kegiatan patroli yang ditingkatkan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, adalah untuk mengantisipasi dan mengurangi potensi kecelakaan laut yang dapat terjadi selama proses pengangkutan logistik ke IKN. Kedua, adalah untuk mengatasi dan mencegah tindak pidana yang dapat mempengaruhi kapal-kapal yang membawa logistik tersebut. Kecelakaan laut dan tindak pidana di perairan ini dapat memiliki dampak serius tidak hanya pada keselamatan manusia tetapi juga pada kelancaran dan keberhasilan proyek pembangunan IKN secara keseluruhan.

Peningkatan yang signifikan dalam volume logistik yang akan dipindahkan ke IKN memperkuat urgensi dari kebijakan pengamanan perairan ini. Dengan adanya peningkatan ini, perlu dipastikan bahwa sistem patroli yang ada dapat mengatasi tuntutan yang lebih besar, termasuk dalam hal pemantauan lalu lintas kapal, penanganan insiden, dan respons cepat terhadap situasi darurat.

Untuk mencapai tujuan ini, proyek perubahan ini akan mengedepankan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengamanan perairan di wilayah IKN. Ini mencakup otoritas maritim dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Melalui sinergi antara berbagai pihak ini, diharapkan akan tercipta kerjasama yang efektif dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi patroli yang optimal.

Sinergitas dengan stakeholder di wilayah perairan juga akan memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik tentang pergerakan kapal dan situasi di perairan IKN. Informasi ini akan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan patroli yang lebih cerdas dan respons yang lebih cepat terhadap insiden atau ancaman keamanan yang terjadi di wilayah perairan.

Selain itu, pengelolaan sumber daya yang efisien juga akan menjadi fokus dalam proyek perubahan ini. Dengan berkolaborasi dan senergi secara efektif, sumber daya manusia, peralatan, dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan patroli dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Ini akan mencakup pelatihan personel, pengembangan teknologi pemantauan yang canggih, serta koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat.

Dalam rangka mencapai tujuan akhirnya, yaitu meningkatkan keamanan dan keberlanjutan terhadap pengangkutan logistik ke IKN, proyek perubahan ini akan terus memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi patroli yang diterapkan. Upaya perbaikan berkelanjutan akan menjadi bagian integral dari pendekatan ini, sehingga dapat mengatasi dinamika yang mungkin timbul seiring dengan perkembangan proyek pembangunan IKN.

Dengan demikian, proyek perubahan ini bukan hanya tentang sinergitas peningkatan aktivitas patroli, tetapi juga tentang menciptakan kerangka kerja yang lebih luas untuk pengamanan perairan di wilayah IKN. Ini adalah langkah penting dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan proyek pembangunan IKN, yang diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan.

b. Tujuan

Tujuan proyek perubahan ini adalah mencapai serangkaian langkah yang strategis dalam tiga jangka waktu yang berbeda, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang akan membawa manfaat nyata dalam meningkatkan keamanan dan pengamanan di wilayah perairan Ibu Kota Nusantara (IKN).

berikut adalah poin-poin penting dari tujuan proyek perubahan ini dalam tiga jangka waktu yang berbeda, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang:

Jangka Pendek:

- a) Menyusun dan penandatanganan MoU dengan stakeholder/ unsur maritim di wilayah Balikpapan.
- b) Pelaksanaan patroli Bersama antara Ditpolairud, Lanal Balikpapan dan KSOP kelas 1 Balikpapan
- c) Pendirian Posko Monitoring Lalu Lintas Pelayaran yang efisien di Kantor Polairud.

Jangka Menengah:

- a) Melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan patroli bersama dengan stakeholder maritim untuk meningkatkan keamanan perairan IKN.
- b) Membentuk kolaborasi yang kuat dalam pengamanan wilayah perairan IKN.
- c) Pengusulan Anggaran untuk Mendukung Pengamanan Perairan IKN

Jangka Panjang:

- a) Meningkatkan dukungan anggaran proyek perubahan.
- b) Meningkatkan pelibatan personel dan armada kapal patroli.
- c) Menjadikan jalur perairan IKN aman dari risiko kecelakaan laut dan tindak pidana, menciptakan lingkungan yang aman dan efisien bagi semua kapal yang beroperasi di wilayah ini.

c. Manfaat

Pengimplementasian proyek perubahan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak terkait, termasuk Ditpolairud, stakeholder, dan masyarakat:

Bagi Ditpolairud:

Mempunyai Posko Monitoring Lalu Lintas Pelayaran di wilayah perairan IKN memberikan Ditpolairud manfaat berupa kemampuan yang lebih baik dalam memantau dan mengelola lalu lintas kapal yang memasuki dan keluar dari perairan IKN. Hal ini menghasilkan efektivitas yang tinggi dalam pemantauan kapal-kapal di wilayah tersebut, memungkinkan tindakan respons yang lebih cepat dalam menghadapi situasi darurat atau ancaman keamanan, serta meningkatkan tingkat keamanan secara keseluruhan.

Bagi Stakeholder:

Tersusunnya Memorandum of Understanding (MoU) dengan unsur maritim dan terlaksananya kerjasama yang efisien dalam pengamanan perairan memberikan manfaat bagi stakeholder maritim. Mereka akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan pengamanan perairan secara bersama-sama dengan otoritas maritim dan Ditpolairud. Ini menciptakan kerangka kerja yang solid untuk koordinasi, berbagi informasi, dan respons terhadap situasi darurat, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat keamanan wilayah perairan IKN.

Bagi Masyarakat:

Masyarakat juga akan mendapat manfaat karena kapal-kapal yang melintasi perairan IKN akan berjalan dengan lancar dan kondisi perairan IKN akan menjadi lebih aman. Hal ini mengurangi risiko kecelakaan laut yang dapat memengaruhi keselamatan penumpang dan awak kapal, serta mengurangi potensi tindak pidana di perairan tersebut. Dengan demikian, keamanan dan keberlanjutan transportasi laut di wilayah IKN akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

d. Visi dan Misi

Visi

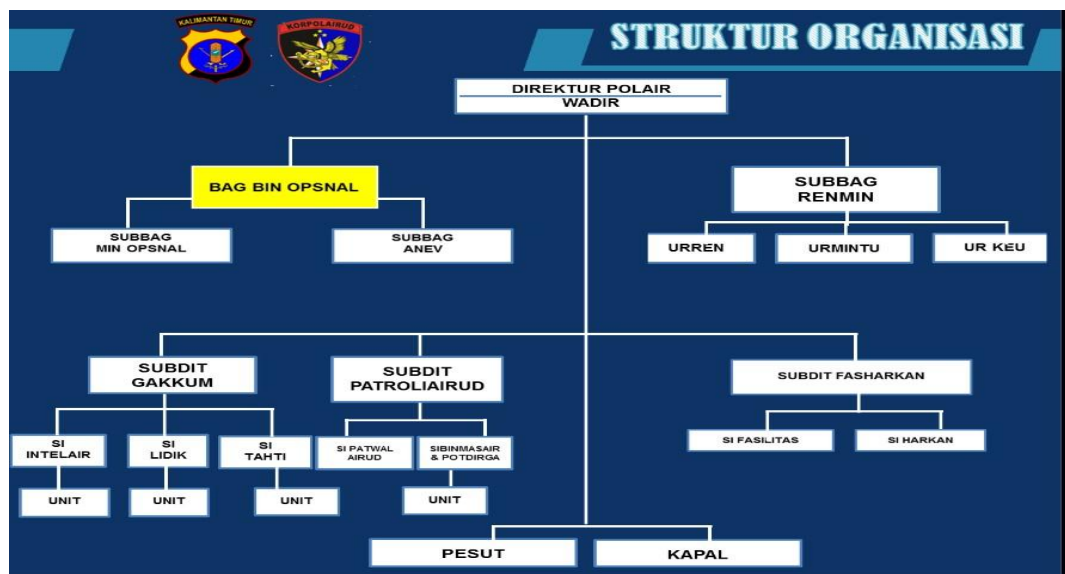
- Mewujudkan Polisi Perairan sebagai Pembina kamtibmas di wilayah Perairan
- Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang profesional, modern dan dipercaya oleh masyarakat

Misi

- Menjamin Keamanan Dan Ketertiban di Wilayah Perairan.
- Memelihara Ketertiban Masyarakat Serta Memberikan Pelayanan Kepastian Hukum.
- Mendorong Perangkat Masyarakat Untuk Lebih Berperan Aktif dalam Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera.
- Memberikan Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam (SAR).
- Membantu Keselamatan Pelayaran.
- Meningkatkan Kerjasama Baik Lintas Sektoral Maupun Internasional.

e. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Ditpolairud Polda Kaltim sebagai berikut :



2. Output dan Outcome Proyek Perubahan

Output yang diharapkan :

Pengamanan perairan merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan kelancaran aktivitas pelayaran, terutama di wilayah perairan yang strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Dalam upaya untuk meningkatkan pengamanan perairan ini, terbentuknya sinergitas dan kolaborasi antara Simlayer, dan aplikasi Digital Marine Traffic menjadi sebuah langkah strategis yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan.

Simlayer: Simlayer adalah singkatan dari "Sistem monitoring Lalu Lintas Kapal pelayaran." Ini adalah sistem Digitalisasi yang dikembangkan untuk memonitor lalu lintas pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Simlayer memiliki peran penting dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai pergerakan kapal-kapal di perairan Indonesia. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas kapal di wilayah perairan IKN.

VTS (Vessel Traffic Service): VTS adalah sistem Digitalisasi yang digunakan untuk memantau dan mengontrol lalu lintas kapal di perairan tertentu. Ini mencakup pemantauan posisi, arah, kecepatan, dan informasi penting lainnya mengenai kapal-kapal yang beroperasi di wilayah tertentu. VTS bertujuan untuk menghindari kecelakaan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas maritim, dan mengoptimalkan penggunaan wilayah perairan.

Aplikasi Digital Simlayer: adalah salah satu alat yang berbasis Digitalisasi digunakan untuk menampilkan posisi kapal-kapal secara real-time. Aplikasi berbasisi Digital ini menyediakan informasi yang dapat diakses oleh pengguna, untuk melacak dan memantau pergerakan kapal. Dengan menggunakan data yang dihasilkan oleh perangkat pelacakan di kapal-kapal itu sendiri, aplikasi ini memberikan visualisasi yang akurat tentang posisi kapal dan kondisi perairan.

Outcome yang Diharapkan:

Dalam konteks ini, outcome yang diharapkan adalah berjalan lancarnya sinergitas bersama Intansi Maritim dengan dukungan aplikasi Simlayar dengan kegiatan patroli Bersama yang dilaksanakan. Kolaborasi ini harus dapat mencapai beberapa manfaat yang nyata dalam meningkatkan pengamanan perairan IKN:

1. Respon yang Lebih Cepat

Dengan informasi yang lebih lengkap dan akurat, pihak berwenang akan dapat merespons situasi darurat atau ancaman keamanan dengan lebih cepat dan efektif. Ini akan meningkatkan tingkat keamanan bagi kapal-kapal yang beroperasi di wilayah IKN.

2. Peningkatan Koordinasi

Kolaborasi ini akan meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengamanan perairan IKN, termasuk Ditpolairud, pihak berwenang maritim, dan operator kapal. Koordinasi yang lebih baik akan membantu dalam menghadapi tantangan keamanan dengan lebih baik.

3. Keamanan dan Keselamatan

Hasil akhir yang paling penting adalah meningkatnya tingkat keamanan dan keselamatan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayaran di perairan IKN. Dengan berjalannya kolaborasi ini, diharapkan akan ada penurunan insiden kecelakaan dan tindak pidana di wilayah perairan tersebut.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pelaksanaan proyek perubahan ini difokuskan kepada Ruang Lingkup sinergitas Ditpolairud (Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara) dan Stakeholder Maritim untuk Peningkatan Pengamanan Perairan IKN

Sinergitas antara Ditpolairud dan stakeholder maritim merupakan langkah strategis dalam memfokuskan upaya untuk meningkatkan pengamanan perairan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Fokus utama dari kolaborasi ini adalah fungsi tugas Ditpolairud sebagai pelaksana patroli perairan yang melibatkan stakeholder maritim dalam harapan dapat meningkatkan pengamanan perairan IKN melalui pemanfaatan sistem monitoring lalu lintas perairan yang lebih efektif dan efisien.

Pengamanan Perairan IKN:

Wilayah perairan IKN memiliki signifikansi strategis sebagai pintu gerbang utama untuk aktivitas pelayaran dan perekonomian maritim di Indonesia. Oleh karena itu, pengamanan perairan IKN menjadi suatu keharusan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas kapal. Pengamanan ini mencakup berbagai aspek, termasuk penegakan hukum maritim, penanganan situasi darurat, dan pencegahan tindak pidana di perairan.

Peran DITPOLAIRUD:

Ditpolairud merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peran utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Ditpolairud memiliki tugas utama dalam hal pelaksanaan patroli perairan dan penegakan hukum di wilayah perairan, termasuk IKN. Dengan wilayah kerja yang mencakup IKN, Ditpolairud memiliki peran sentral dalam memastikan keamanan perairan ini.

Stakeholder Maritim:

Stakeholder maritim mencakup berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas maritim di wilayah perairan IKN. Ini termasuk operator kapal, perusahaan pelayaran, pelabuhan, pihak berwenang maritim, lembaga terkait lainnya, dan masyarakat maritim secara umum. Stakeholder ini memiliki peran kunci dalam menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas kapal di wilayah perairan IKN.

Pemanfaatan Sistem Monitoring Lalu Lintas Perairan:

Sistem monitoring lalu lintas perairan adalah alat penting dalam pemantauan kapal-kapal yang beroperasi di perairan tertentu. Sistem ini mencakup berbagai teknologi Digitalisasi seperti Vessel Traffic Service (VTS). Fungsinya adalah memungkinkan pemantauan posisi, arah, kecepatan, dan informasi penting lainnya mengenai kapal-kapal. Dengan informasi ini, pihak berwenang dapat memantau lalu lintas kapal, mendeteksi potensi masalah, dan merespons dengan cepat terhadap situasi darurat atau ancaman keamanan.

Tujuan sinergitas:

Sinergitas antara Ditpolairud dan stakeholder maritim memiliki tujuan utama yang sangat jelas, yaitu meningkatkan pengamanan perairan IKN. Adapun tujuan lebih rinci yang ingin dicapai melalui kolaborasi ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang Lebih Baik

Dengan melibatkan stakeholder maritim, sinergitas ini akan meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengamanan perairan. Ini menciptakan kerangka kerja yang solid untuk berbagi informasi, berkoordinasi dalam tindakan pengamanan, dan merespons situasi darurat dengan lebih efektif.

2. Respons Cepat

Memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap situasi darurat atau ancaman keamanan. Pihak berwenang dapat merespons dengan lebih efektif untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan.

3. Keamanan dan Keselamatan

Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan keamanan dan keselamatan bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas pelayaran di perairan IKN. Sinergitas ini harus meminimalkan risiko kecelakaan dan tindak pidana di wilayah perairan tersebut.

Manfaat Sinergitas:

Sinergitas Ditpolairud dan stakeholder maritim memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang nyata dalam pengamanan perairan IKN. Beberapa manfaat yang diharapkan dari kolaborasi ini termasuk:

1. **Pengamanan yang Lebih Efektif**
Dengan dukungan stakeholder maritim, pengamanan perairan akan menjadi lebih efektif dalam mencegah tindak pidana maritim, seperti penyelundupan dan perompakan kapal.
2. **Keselamatan Pelayaran**
Sinergitas ini akan meningkatkan keselamatan pelayaran di wilayah perairan IKN dengan memastikan bahwa lalu lintas kapal berjalan lancar dan aman.
3. **Pencegahan Kecelakaan**
Dengan pemantauan yang lebih baik, kolaborasi ini dapat membantu dalam mencegah kecelakaan di perairan IKN, yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kehilangan nyawa.
4. **Pemberantasan Tindak Pidana**
Kolaborasi ini juga dapat membantu dalam pemberantasan tindak pidana maritim seperti pencurian, penyelundupan, dan peredaran narkoba.
5. **Dukungan bagi Ekonomi Maritim**
Dengan pengamanan yang lebih baik, wilayah perairan IKN akan menjadi lebih menarik bagi investasi

II. IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

1. Capaian Hasil Implementasi Proyek Perubahan

Capaian hasil Implementasi proyek perubahan jangka pendek Milestones sebagai berikut :

TARGET/OUTPUT KUNCI	MILISTONE	KEGIATAN	OUTPUT/ EVIDENCE	JADWAL
1.Pembentukan Tim Efektif	Tim Efektif	• Pembuatan Sprint Tim Efektif • Rapat Tim Efetif	Tersusunnya sprint Tim efektif	Minggu Ketiga September 2023
2.Komunikasi dan koordinasi dengan Stakeholder;	Identifikasi Stakeholder	• Koordinasi Dgn Danlanal Bppn • Koordinasi Dgn Ksop	Terlaksananya koordinasi dengan stakeholder	Minggu Keempat September 2023
3.Penyusunan Draf MoU	Rapat penyusunan Draf MoU	• Pembuatan undangan rapat susun MoU • Rapat penyusunan MoU	Tersusunnya Draf MoU	Minggu pertama Oktober 2023
4. Penyusunan pembuatan Posko Simlayar	Persiapan penyusunan posko Simlayar	Penyiapan saranan dan prasarana Posko Simlayar	Tersusunnya persiapan Psoko Simlayar	Minggu kedua Oktober 2023

5. Pengoperasian Simlayar	Pembentukan Posko Simlayar Pengoperasian Simlayar	Pengoperasian Simlayar	Terlaksananya operasional Simlayar	Minggu ketiga Oktober 2021
6. Penandatanganan MoU	Koordinasi Penandatanganan MoU	Penandatanganan MoU	Terlaksananya penandatanganan MoU	Minggu keempat Oktober 2023
7. Pelaksanaan Patroli Bersama	Persiapan pelaksanaan patroli	Koordinasi Pelaksanaan Patroli Bersama	Terlaksananya patroli Bersama	Minggu Pertama November 2023
8. Penyusunan video	Pengambilan dokumentasi masing masing kegiatan	Penyusunan video	Tersusunnya video kegiatan	Minggu Kedua November 2023
9. Pengecekan hasil Proyek Perubahan	Pengecekan hasil Proyek Perubahan	Pengecekan hasil Proyek Perubahan	Terlaksananya pengecekan hasil proper	Minggu Ketiga November 2023
10. Penyusunan laporan Implementasi Proyek Perubahan	Penyusunan laporan Implementasi Proyek Perubahan	Penyusunan laporan Implementasi Proyek Perubahan	terlaksananya Penyusunan laporan Implementasi Proyek Perubahan	Minggu Keempat November 2023

MILESTONE JANGKA PENDEK SIPAMER

No	Uraian Kegiatan	September				Oktober				November				OUTPUT	PIC
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Pembentukan Tim Efektif													Tersusunnya sprin Tim Efektif	Dokumentasi /Surat
2	Komunikasi dan koordinasi dengan Steakholder													Terlaksananya koordinasi dengan Steakholder	Dokumentasi
3	Penyusunan Draf MoU													Tersusunnya Draf MoU	Dokumentasi/Surat
4	Penyusunan pembuatan Posko Simlayar													Tersusunnya persiapan Posko Simlayar	Dokumentasi
5	Pengoperasionalan Simlayar													Terlaksananya Operasional Simlayar	Dokumentasi
6	Penandatanganan MoU													Terlaksananya penandatanganan MoU	Dokumentasi/Surat
7	Pelaksanaan patroli bersama													Terlaksananya patroli bersama	Dokumentasi
8	Penyusunan video													Tersusunnya video kegiatan	Dokumentasi
9	Pengecekan hasil proyek perubahan													Terlaksananya pengecekan hasil proper	Dokumentasi
10	Penyusunan laporan Implementasi Proyek Perubahan													Terlaksananya Penyusunan laporan Implementasi Proyek Perubahan	Dokumentasi

Dokumen pelaksanan tahap jangka pendek sebagai berikut :

1. Penyusunan Tim efektif

Tim efektif merupakan Personel Ditpolairud Polda Kaltim berjumlah 11 orang terdiri 3 Tim bertugas untuk membantu perses penyusunan Implementasi proyek perubahan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/681/IX/HUK.6.6/2023

Perimbangan: bahwa dalam rangka implementasi Proyek Perubahan Peserta PKN Tingkat II TA 2023 dengan judul Sinergitas Pengamanan Perairan (SIPAMER) Guna Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara Di Kalimantan Timur.

- Dasar :
1. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 463/D 4/PDP.07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri.
 2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/2023/VII/DIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal perintah mengikuti pelatihan kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 di Pusdikmin Lemdiklat Polri.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH.

- Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, ditunjuk menjadi tim efektif dalam Proyek Perubahan Peserta PKN Tingkat II TA 2023 a.n.AKBP Bahri S.H dengan judul Sinergitas Pengamanan Perairan (SIPAMER) Guna Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara Di Kalimantan Timur;
 2. melaksanakan tugas pada tanggal 18 September s/d 27 November 2023 ;
 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama serta penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Dirpolairud Polda Kaltim.

Selesai.

Dikeluarkan di: Balikpapan
pada tanggal : 18 September 2023
DIRPOLAIRUD POLDA KALIMANTAN TIMUR



PAHALA M.PANJAITAN S.Y.K.M.S.I
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 700100196

- Tembusan :
1. Kapolda Kaltim.
 2. Inwasda Polda Kaltim.
 3. Kabidpropam Polda Kaltim.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

LAMP SURAT PERINTAH DIRPOLAIRUD POLDA KALTIM
NOMOR : SPRIN/ 681/IX/HUK.6.6/2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

DAFTAR NAMA PERSONEL YANG TERLIBAT DALAM TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	
			STRUKTURAL	POKJA
1	KASianto	KOMPOL/ 67120267	PIKASUBBAGRENMIN	KETUA TIM POKJA
2	AGUS DWI SOETOPO	IPTU / 70080080	Ps. PAUR SUBBAGMINOPSNAL	TIM PENDATAAN
3	IMAM PURBA ASHARI	BRIPDA/00070352	BAMIN SUBBAGMINOPSNAL	ANGGOTA
4	HINGGRITA DIEFA AYU PALUPI	BRIPDA/99110454	BAMIN URMIN	ANGGOTA
5	EDY HERIYANTO	IPDA/ 75090472	PAMIN 3 SUBBAGRENMIN	TIM DOKUMENTASI
6	AZMIN.S.H.	BRIP TU/96110956	BAMIN SUBBAGMINOPSNAL	ANGGOTA
7	MUHAMMAD FADLI	BRIPDA/01090779	BAMIN SUBBAGMINOPSNAL	ANGGOTA
8	IBNU GUNTORO, S.H.	BRIPKA/ 89020563	BAUR SUBBAGANEV	TIM ADMINISTRASI
9	AGUS SUSANTO, S.H	BRIGADIR/92080019	BAMIN SUBBAGMINOPSNAL	ANGGOTA
10	MUCHAMMAD TAUFIK	BRIGADIR/ 90090025	BAMIN URMIN	TIM IT
11	DWI SELFY FEBRIANTI, A.Md	BRIP TU/95020716	BAURSUBBAGANEV	ANGGOTA

Dikeluarkan di: Balikpapan
pada tanggal : 18 September 2023
DIRPOLAIRUD POLDA KALIMANTAN TIMUR



- Tembusan :
1. Kapolda Kaltim.
 2. Inwasda Polda Kaltim.
 3. Kabidpropam Polda Kaltim.

2. Komunikasi dan koordinasi dengan Stakeholder;

Melaksanakan Koordinasi Komandan Pangkalan TNI AL Balikpapan



Melaksanakan Koordinasi dengan Kasi Patroli, penjagaan dan penyidikan
KSOP Kelas 1 Balikpapan



Koordinasi dengan Staf Kantor Distrik Navigasi Balikpapan



3. Penyusunan Draf MoU

Pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 bertempat di Kantor Dit Polairud Polda Kaltim telah dilakukan penyusunan Draf MoU tentang Sinergitas pengamanan perairan Bersama TNI AL Balikpapan dan KSOP Kelas 1 Balikpapan.



4. Penyusunan pembuatan dan pengoperasionalan Posko Simlayar

Pembuatan Posko SIMLAYAR di Mako Polairud Polda Kaltim dengan menggunakan ruangan Binopsnal dengan memanfaatkan sarana dan Prasarana Ditpolairud Polda Kaltim



5. Penandatanganan MoU

Pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di Kantor KSOP Kelas 1 Balikpapan telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara Polda Kaltim, TNI AL Balikpapan dan KSOP kelas 1 Balikpapan.



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

PANGKALAN TENTERA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT BALIKPAPAN

DAN

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BALIKPAPAN

NOMOR : MoU/24/X/HUK.8.1.1./2023

NOMOR : B/709/X/2023

NOMOR : HK.201/1/17/KSOP.BPN 2023

TENTANG

SINERGITAS PENGAMANAN PERAIRAN
GUNA Mendukung PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA
DI KALIMANTAN TIMUR

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balikpapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini sebagai berikut :

1. KOMISARIS BESAR POLISI PAHALA H.M PANJAITAN, S.I.K., M.Si, selaku DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALIMANTAN TIMUR, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor: Sprin/2415/X/HUK.8.1.1./2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang pendelegasian penandatanganan Nota Kesepahaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (POLDA KALTIM), berkedudukan dan ber Kantor di Jalan Syarifuddin Yoes No. 99 Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. KOLONEL

3.

12

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

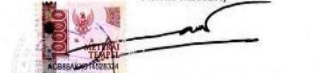
PIHAK PERTAMA,


PAHALA H.M PANJAITAN, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70010196

PIHAK KEDUA,


Dr. HENNY HANLA, S.H., S.Tr.Han., M.Tr.Hanla., M.M., M.Sc.
KOLONEL LAUT (P) NRP 14824/P

PIHAK KETIGA,


Capt. BHARTO ARI RAHARJO, M.Si.
Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19760108 200502 1 002

6. Pelaksanaan Patroli Bersama

Pada hari Selasa tanggal 7 nopember 2023 telah di laksanakan patrol Bersama antara Ditpolairud Polda Kaltim, TNI AL Balikpapan dan KSOP Kelas 1 Balikpapan dengan menggunakan Sarana Kapal Patroli KP. 2018 Ditpolairud Polda Kaltim dengan sasaran memonitor pergerakan kapal kapal yang lalu Lalang di perairan IKN



2. Deskripsi Kepemimpinan Strategis

Kepemimpinan adalah aspek kunci dalam pengelolaan organisasi, yang berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi dan menghadapi tantangan yang berkembang di lingkungan Organisasi yang berubah dengan cepat. Kepemimpinan strategis adalah salah satu pendekatan yang sangat penting dalam mengarahkan suatu organisasi menuju kesuksesan jangka panjang.

Kepemimpinan strategis adalah jenis kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan dan implementasi strategi organisasi. Ini melibatkan pemimpin dalam perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi, serta pengambilan keputusan strategis yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Pemimpin strategis bertanggung jawab untuk mengarahkan organisasi dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di lingkungan bisnis.

Pemimpin strategis memiliki visi yang jangka panjang untuk organisasi dan mampu mengembangkan rencana strategis yang mendukung visi tersebut, Selalu fokus pada mencapai misi organisasi dan memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan mendukung pencapaian misi tersebut, Pemimpin strategis mampu merencanakan tindakan jangka panjang dan mengidentifikasi peluang serta risiko yang mungkin muncul, Memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan bisnis dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, Pemimpin strategis mampu mengambil keputusan yang sulit, terutama dalam konteks strategis, dan memprioritaskan tindakan yang mendukung tujuan jangka panjang.

Pentingnya Kepemimpinan Strategis

Kepemimpinan strategis sangat penting dalam mengarahkan organisasi menuju keberhasilan jangka panjang. Beberapa alasan mengapa kepemimpinan strategis penting adalah:

- a. Organisasi selalu dihadapkan pada berbagai tantangan dan perubahan dalam lingkungan bisnis. Pemimpin strategis membantu organisasi mengatasi tantangan ini dengan merancang dan melaksanakan strategi yang tepat.
- b. Pemimpin strategis dapat membantu organisasi dalam pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan strategis.
- c. Pemimpin strategis memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi tim serta mengambil keputusan yang sulit, mengarahkan organisasi ke arah yang benar.
- d. Kepemimpinan strategis membantu organisasi dalam merumuskan rencana jangka panjang yang terarah, memberikan focus yang konsisten pada tujuan strategis.

3. Implementasi Strategi Marketing

a. Dukungan Stakeholder

Stakeholder adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu, kelompok, organisasi, atau entitas lain yang memiliki kepentingan, kontribusi, atau keterlibatan dalam suatu proyek, organisasi, atau inisiatif tertentu. Stakeholder memiliki peran atau kepentingan dalam pengambilan keputusan atau hasil dari aktivitas tersebut.

Adapun Stakeholder pada proyek perubahan ini sebagai berikut :

1). Latents (Pengaruh Tinggi Kepentingan Rendah):

- a) Gubernur: Sebagai pemimpin tingkat provinsi yang memiliki wewenang atas wilayah IKN, Gubernur memiliki pengaruh tinggi namun mungkin memiliki kepentingan yang tidak begitu besar dalam aspek tertentu dari proyek atau aktivitas di wilayah tersebut.
- b) Otoritas IKN : Dukungan otoritas Ibu Kota Negara (IKN) dalam proyek perubahan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan dan keberlanjutan inisiatif tersebut. Sebagai entitas yang mewakili pusat pemerintahan dan kebijakan negara, Otoritas IKN dapat memberikan dukungan dalam berbagai aspek terhadap proyek perubahan.
- c) Bupati: Bupati sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten yang berbatasan dengan IKN juga memiliki pengaruh tinggi terhadap wilayah tersebut tetapi mungkin memiliki kepentingan yang bervariasi dalam berbagai aspek kebijakan dan pengembangan IKN.
- d) Distrik Navigasi KSOP: Distrik Navigasi sebagai badan pemerintah yang mengatur navigasi di wilayah perairan memiliki pengaruh tinggi, tetapi kepentingan mereka mungkin bervariasi tergantung pada peraturan navigasi dan keamanan.

- e) TNI AL: Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut memiliki pengaruh tinggi terhadap pengamanan perairan, tetapi kepentingan mereka mungkin lebih fokus pada aspek keamanan dan pertahanan daripada pembangunan IKN itu sendiri.

2). Promotors (Pengaruh Tinggi Kepentingan Tinggi):

- a) Kapolda Kaltim: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur memiliki pengaruh tinggi dalam pengamanan dan penegakan hukum di wilayah tersebut dan memiliki kepentingan yang tinggi dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
- b) Kakorpolairud: Kepala Korps Polisi Perairan dan Udara memiliki pengaruh tinggi dalam pengamanan perairan dan kepentingan yang tinggi dalam memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas perairan.
- c) Karoops: Kepala Bagian Operasional Korps Polisi Perairan dan Udara memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi dalam mengkoordinasikan operasional dan pengamanan perairan.
- d) Dirpolairud Polda Kaltim: Direktur Polisi Perairan dan Udara di tingkat Polda Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab dalam operasional perairan dan memiliki kepentingan yang tinggi dalam keamanan wilayah perairan.
- e) Kapolres PPU: Kepala Kepolisian Resort Penajam Paser Utara memiliki pengaruh tinggi dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut dan memiliki kepentingan tinggi dalam menjaga ketertiban dan keamanan lokal.

3). Apathetics (Pengaruh Rendah Kepentingan Rendah):

- a) Perusahaan Pelayaran: Perusahaan pelayaran mungkin memiliki pengaruh yang rendah dalam pengambilan keputusan terkait IKN dan juga mungkin memiliki kepentingan yang rendah selama operasional mereka berjalan lancar.
- b) Nelayan: Nelayan mungkin memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah dalam proyek atau aktivitas di wilayah IKN, terutama jika aktivitas mereka tidak secara langsung terpengaruh oleh pembangunan IKN.

4). Defenders (Pengaruh Rendah Kepentingan Tinggi):

Personel Ditpolairud: Personel dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara mungkin memiliki pengaruh yang rendah dalam pengambilan keputusan tetapi memiliki kepentingan yang tinggi dalam menjaga keamanan dan kelancaran perairan IKN, serta mendukung tugas mereka. Pemahaman yang baik tentang stakeholder ini membantu dalam manajemen hubungan dan komunikasi yang efektif dengan semua pihak yang terlibat dalam proyek atau aktivitas di wilayah IKN.

Stakeholder dalam proyek perubahan



b. Diseminasi dan publikasi proyek perubahan

Diseminasi dan publikasi suatu proyek perubahan adalah proses penting dalam membagikan informasi dan hasil proyek perubahan kepada berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat secara lebih luas. Ini melibatkan berbagai strategi dan taktik untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dari proyek perubahan mencapai audiens yang sesuai, meningkatkan pemahaman, mendapatkan dukungan, dan mendorong perubahan yang positif.

Berikut adalah deskripsi tentang diseminasi dan publikasi proyek perubahan:

- 1) Diseminasi adalah proses menyebarkan informasi tentang proyek perubahan ke pemangku kepentingan yang relevan, seperti pihak berwenang, stakeholder, anggota tim, dan pihak yang terpengaruh. Ini termasuk berbagi laporan, hasil pelaksanaan, dan evaluasi dengan stakeholder yang memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Publikasi eksternal melibatkan penyebaran informasi tentang proyek perubahan kepada publik yang lebih luas, termasuk masyarakat umum, media, dan organisasi non-pemerintah. Ini bisa dilakukan melalui berita pers, artikel, situs web, atau media social.
- 3) Dokumentasi adalah proses menciptakan catatan tertulis, visual, atau multimedia yang mencerminkan progres dan pencapaian proyek perubahan. Ini mencakup laporan proyek, video dokumenter, foto, dan publikasi berbasis teks yang mendokumentasikan perjalanan implementasi proyek perubahan.
- 4) Komunikasi yang terarah adalah kunci dalam diseminasi dan publikasi. Ini mencakup mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, mengadaptasi pesan dan bahasa kepada audiens yang berbeda, dan menggunakan saluran komunikasi yang sesuai untuk mencapai mereka.

- 5) Mengukur dampak diseminasi dan publikasi adalah penting untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi. Ini dapat melibatkan pemantauan reaksi, tingkat partisipasi masyarakat, perubahan sikap, atau tindakan konkret yang diambil sebagai hasil dari komunikasi.
- 6) Diseminasi dan publikasi proyek perubahan harus menjadi upaya yang berkelanjutan, tidak hanya dilakukan selama fase akhir proyek perubahan. Ini memastikan bahwa pembelajaran dan dampak proyek perubahan dapat berlangsung dengan baik.

Pentingnya Diseminasi dan Publikasi

- 1) Diseminasi dan publikasi memungkinkan organisasi atau masyarakat untuk berbagi pengetahuan dan pembelajaran yang dihasilkan dari proyek perubahan. Ini memungkinkan penyebaran ide dan praktik terbaik kepada pihak-pihak yang relevan.
- 2) Melalui publikasi proyek perubahan, organisasi dapat menarik perhatian mitra potensial, stakeholder, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.
- 3) Diseminasi dan publikasi menciptakan akuntabilitas dan transparansi, karena hasil proyek menjadi tersedia untuk publik dan pemangku kepentingan. Ini membantu menghindari praktik yang tidak etis dan mempromosikan integritas.
- 4) Informasi yang diseminasi dapat memengaruhi opini publik dan masyarakat secara lebih luas, mendukung pengambilan keputusan yang positif dalam konteks proyek perubahan.
- 5) Dengan menyebarkan hasil dan dampak proyek perubahan, organisasi dapat lebih mudah mendapatkan dukungan finansial dan sumber daya lainnya untuk proyek-proyek masa depan.

Strategi Diseminasi dan Publikasi yang dilakukan :

- 1) Manfaatkan platform media sosial untuk berbagi informasi tentang proyek perubahan. Posting berita, gambar, dan cerita sukses dapat menciptakan kesadaran yang lebih besar.
- 2) Kerja sama dengan media lokal dan nasional untuk memberitakan proyek perubahan. Wawancara, artikel, atau siaran pers dapat memperluas jangkauan informasi.
- 3) Buat situs web atau blog yang khusus didedikasikan untuk proyek perubahan. Ini bisa menjadi sumber informasi terperinci tentang proyek.
- 4) Buat video dokumenter atau materi multimedia lainnya yang menjelaskan proyek dan hasilnya. Video memiliki potensi untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

c. Pemanfaatan sumber daya organisasi

Sumber daya adalah elemen penting dalam suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif adalah kunci keberhasilan organisasi. Sumber daya organisasi mencakup berbagai aspek, seperti manusia, keuangan, teknologi, dan waktu.

Pentingnya Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi

Pemanfaatan sumber daya organisasi adalah penting karena:

- 1) Pemanfaatan yang baik dari sumber daya dapat meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Ini mencakup penggunaan tenaga kerja, pengelolaan dana, dan penggunaan teknologi yang tepat.
- 2) Dengan mengelola sumber daya dengan baik, organisasi dapat menghemat biaya operasional dan mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan yang lebih penting.
- 3) Pemanfaatan sumber daya yang baik dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan yang diberikan oleh organisasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna.

- 4) Organisasi yang dapat mengoptimalkan sumber daya cenderung lebih kompetitif dalam pasar serta dapat merespons perubahan dengan lebih cepat dan berinovasi lebih baik.
- 5) Pemanfaatan sumber daya yang efektif mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan lebih baik. Organisasi dapat mengarahkan sumber daya ke hal-hal yang mendukung visi dan misi.

Strategi Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi :

Beberapa strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi meliputi:

- 1) Perencanaan yang matang yang mencakup alokasi sumber daya. Ini termasuk merumuskan rencana strategis dan operasional yang jelas.
- 2) Mengevaluasi penggunaan sumber daya dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
- 3) Pengelolaan proyek perubahan yang efektif dapat membantu organisasi dalam mengelola sumber daya untuk pencapaian tujuan proyek dengan lebih baik.
- 4) Meningkatkan proses internal untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi.
- 5) Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah penting. Personel yang terampil dan terlatih dapat lebih efektif dalam menggunakan sumber daya lainnya.

4. Keberlanjutan proyek perubahan

Proyek perubahan adalah upaya yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan positif dalam organisasi atau masyarakat. Namun, keberhasilan suatu proyek perubahan tidak hanya bergantung pada tahap pelaksanaan proyek perubahan itu sendiri, melainkan juga pada keberlanjutan hasil dan dampaknya dalam jangka panjang.

Pentingnya Keberlanjutan Proyek Perubahan

Keberlanjutan proyek perubahan memiliki banyak manfaat, antara lain:

- 1) Keberlanjutan memungkinkan proyek perubahan untuk terus memberikan dampak positif dalam jangka panjang, daripada hanya menjadi usaha singkat.
- 2) Keberlanjutan Proyek perubahan memungkinkan organisasi atau masyarakat untuk terus mempelajari dari pengalaman proyek perubahan tersebut dan menerapkan pembelajaran itu pada proyek perubahan berikutnya.
- 3) Dengan menjaga efek perubahan dalam jangka panjang, keberlanjutan dapat membantu menciptakan perubahan budaya dalam organisasi.
- 4) Beberapa perubahan mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan, dan keberlanjutan adalah kunci untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul di tengah perjalanan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan proyek perubahan meliputi:

- 1) Dukungan dari mentor, stakeholder dan instansi terkait, adalah penting untuk menjaga keberlanjutan.
- 2) Rencana yang mencakup langkah-langkah untuk mempertahankan hasil proyek perubahan dalam jangka panjang perlu dipertimbangkan sejak awal.
- 3) Keberlanjutan memerlukan anggaran yang cukup untuk mempertahankan proyek perubahan, Perencanaan keuangan yang bijak diperlukan.
- 4) Meningkatkan kapasitas organisasi atau masyarakat dalam mengelola proyek perubahan dan menjaga keberlanjutan adalah penting.
- 5) Sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat akan membantu mengidentifikasi masalah dan peluang untuk perbaikan.

Untuk memastikan keberlanjutan proyek perubahan, beberapa strategi yang diterapkan:

- 1) Melibatkan mentor dan stakeholder dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan proyek perubahan akan meningkatkan dukungan dan keberlanjutan.
- 2) Mengembangkan kemampuan dan pengetahuan stakeholder dalam menjalankan proyek perubahan dan mempertahankan hasilnya.
- 3) Memastikan bahwa hasil proyek perubahan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan prosedur organisasi.
- 4) Menjaga komunikasi dengan Stakeholder mengenai perkembangan dan manfaat yang terus berlanjut dari proyek perubahan.

a. Dukungan mentor untuk keberlanjutan Proyek Perubahan

Proyek perubahan merupakan upaya untuk mencapai transformasi positif dalam suatu organisasi. Dukungan mentor memainkan peran yang krusial dalam memastikan keberlanjutan proyek perubahan, dimana dukungan mentor menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutannya. Dengan pengalaman, pengetahuan, dan bimbingan, mentor dapat membantu tim proyek perubahan mengatasi hambatan, merencanakan strategi jangka panjang, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu, pilihan mentor yang tepat dan integrasi ke dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek perubahan adalah langkah penting untuk menjaga kesinambungan dan keberhasilan proyek dalam jangka panjang.

Pentingnya Dukungan Mentor :

- a. Mentor membawa pengalaman praktis yang berharga dari proyek perubahan, memberikan wawasan yang mendalam tentang hambatan yang mungkin dihadapi dan cara mengatasinya.
- b. Mentor memberikan pandangan objektif dari luar terhadap proyek perubahan, membantu mengidentifikasi potensi perubahan dan memperkuat strategi yang sedang diterapkan.
- c. Dukungan mentor membuka pintu untuk jaringan dan koneksi yang dapat mendukung proyek perubahan. Ini mencakup akses ke sumber daya, mitra potensial, dan peluang kolaborasi.

- d. Mentor dapat membimbing dan memotivasi anggota tim, membantu mengatasi tantangan, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan.
- e. Mentor dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan praktis kepada anggota tim, memastikan bahwa pembelajaran dari proyek perubahan sebelumnya dapat dimanfaatkan.

Peran Mentor dalam keberlanjutan Proyek perubahan :

- a. Mentor membantu tim proyek perubahan dalam merinci dan merencanakan strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, memastikan bahwa proyek perubahan tidak hanya berfokus pada hasil segera, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan.
- b. Mentor membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul selama dan setelah implementasi proyek, memastikan keberlanjutan proyek perubahan tidak terhambat oleh kendala tak terduga.
- c. Mentor membantu dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan, manajemen waktu, dan komunikasi tim, menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan.
- d. Mentor memberikan pandangan dan pengalaman untuk membantu tim proyek perubahan mengatasi masalah yang muncul, mendorong pemikiran kreatif dan solusi inovatif.
- e. Mentor mendorong pemberdayaan tim, memotivasi anggota tim untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan proyek perubahan.



b. Rencana implementasi jangka menengah dan jangka panjang

Jangka Menengah:

1) Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Patroli Perairan

Melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan patroli bersama dengan stakeholder maritim untuk meningkatkan keamanan perairan IKN. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan patroli perairan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa operasi berjalan sesuai rencana dan efektif dalam mencapai tujuan pengamanan

2) Membentuk kolaborasi yang kuat dalam pengamanan wilayah perairan IKN.

3) Pengusulan Anggaran untuk Mendukung Pengamanan Perairan IKN Dalam jangka menengah, perlu mengusulkan anggaran yang mencukupi untuk mendukung operasi pengamanan perairan di IKN. Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai operasional patroli, pemeliharaan peralatan, dan pelatihan personel.

Jangka Panjang:

1) Meningkatkan dukungan anggaran proyek perubahan.

2) Meningkatkan pelibatan personel dan armada kapal patroli.

3) Menjadikan jalur perairan IKN aman dari risiko kecelakaan laut dan tindak pidana, menciptakan lingkungan yang aman dan efisien bagi semua kapal yang beroperasi di wilayah ini

5. Pemberdayaan organisasi pembelajar

Pemberdayaan organisasi pembelajar adalah pendekatan yang mengedepankan pengembangan kapasitas, pembelajaran berkelanjutan, dan inovasi sebagai inti dari keberhasilan organisasi. Organisasi pembelajar bukan hanya fokus pada pencapaian tujuan saat ini, tetapi juga berkomitmen untuk memajukan pengetahuan dan keterampilan anggota organisasi secara terus-menerus.

Organisasi pembelajar adalah organisasi yang berorientasi pada pembelajaran kontinu, memotivasi anggota untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran, dan mengintegrasikan pembelajaran ke dalam rutinitas sehari-hari. Pemberdayaan organisasi pembelajar memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan inovasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan mendukung perkembangan anggota.

Pemberdayaan organisasi pembelajar adalah landasan bagi keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Dengan menciptakan budaya pembelajaran, mendorong partisipasi, dan memberikan dukungan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan adaptasi, inovasi, dan kesejahteraan karyawan. Oleh karena itu, investasi dalam pemberdayaan organisasi pembelajar bukan hanya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga investasi dalam masa depan organisasi itu sendiri.

Strategi Pemberdayaan Organisasi Pembelajar :

- a. Membuat rencana pembelajaran terstruktur yang mencakup pelatihan formal, dan pengalaman belajar praktis.
- b. Menyediakan akses mudah ke sumber daya pembelajaran, baik melalui perpustakaan digital, platform e-learning, atau mentorship internal.
- c. Memberikan insentif dan menghargai partisipasi aktif anggota organisasi dalam program pembelajaran.
- d. Mendorong pengembangan kepemimpinan dengan memberikan peluang bagi personel untuk memimpin inisiatif pembelajaran.

Implementasi strategis pengembangan kompetensi tim dan potensi diri

Pengembangan kompetensi tim dan potensi diri menjadi aspek kritis dalam meningkatkan kinerja individu dan kelompok dalam konteks organisasi. Implementasi strategis dalam pengembangan ini memerlukan pendekatan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Implementasi strategis pengembangan kompetensi tim dan potensi diri adalah langkah esensial dalam mencapai kesuksesan organisasi. Dengan memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan individu dan tim, organisasi tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang positif tetapi juga berinvestasi dalam masa depan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi tim dan potensi diri harus dianggap sebagai prioritas dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pentingnya Pengembangan Kompetensi Tim dan Potensi Diri

- a. Pengembangan kompetensi tim dan potensi diri meningkatkan kinerja individu dan kelompok, menciptakan tim yang lebih efisien dan efektif.
- b. Tim yang memiliki kompetensi yang ditingkatkan dan individu yang mengembangkan potensi diri cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus di lingkungan kerja.
- c. Pengembangan memberikan peluang bagi anggota tim untuk meningkatkan keterampilan mereka, meningkatkan motivasi, dan menciptakan kepuasan kerja.
- d. Tim yang memiliki kompetensi yang solid dan individu yang menggali potensi diri mereka dapat lebih berkontribusi terhadap proses inovasi dan kreativitas dalam organisasi.
- e. Pengembangan kompetensi tim dan potensi diri memberikan landasan untuk pengembangan kepemimpinan yang kuat di seluruh tingkatan organisasi.

Strategi Implementasi Pengembangan Kompetensi Tim dan Potensi Diri :

- a. Lakukan analisis kebutuhan kompetensi tim dan identifikasi potensi diri anggota untuk merancang program pengembangan yang relevan.
- b. Buat rencana pengembangan yang mencakup tujuan yang jelas, langkah-langkah pelaksanaan, dan metode evaluasi.
- c. Sediakan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan

kebutuhan tim dan individu. Ini dapat melibatkan pelatihan internal, eksternal, atau penggunaan platform e-learning.

- d. Implementasikan program mentorship dan coaching untuk membimbing anggota tim dalam pengembangan kompetensi dan potensi diri mereka.
- e. Tetapkan indikator kinerja yang terukur untuk menilai efektivitas program pengembangan. Gunakan umpan balik dari anggota tim dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan program.

6. Pemanfaatan mata pelatihan pilihan untuk implementasi proyek perubahan

Proyek perubahan dalam suatu organisasi memerlukan persiapan dan pengembangan keterampilan khusus agar berhasil diimplementasikan. Pemanfaatan mata pelatihan pilihan menjadi langkah strategis dalam memastikan anggota tim memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk mendukung dan melaksanakan perubahan dengan sukses.

Pemanfaatan mata pelatihan pilihan merupakan strategi yang efektif dalam mempersiapkan anggota tim untuk menghadapi proyek perubahan. Dengan memberikan kesempatan untuk memilih, organisasi dapat memastikan bahwa pembelajaran bersifat relevan, terlibat, dan mendukung implementasi perubahan. Oleh karena itu, mengintegrasikan mata pelatihan pilihan dalam rencana pengembangan sumber daya manusia adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan proyek perubahan.

Deskripsi pemanfaatan mata pelatihan pilihan untuk pelaksanaan proyek perubahan :

Buku tentang Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di bidang Keamanan dan keselamatan laut :

Deskripsi Buku

Berbagai potensi ancaman, seperti tindak pelanggaran dan tindak pidana di laut atau lewat laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, harus diantisipasi dan ditanggulangi secara optimal. Selain itu, perubahan



lingkungan yang demikian cepat dan dinamis juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di bidang kemaritiman dan memerlukan perhatian kita bersama. Namun, geopolitik keamanan laut belum dipahami sepenuhnya, kebijakan maritim belum konsisten dan berkelanjutan. Masih ada ego sektoral yang disebabkan oleh peran, tugas, dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan di bidang keamanan dan keselamatan laut. bersama

stakeholder terkait perlu terus bersatu padu membangun budaya maritim melalui sinergitas paradigma lintas sektor di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Dalam buku ini, ketiga penulis memberikan saran kepada pemerintah agar kebijakan maritim nasional (national maritime policy) dapat menjadi kebijakan nasional yang integratif guna menghindari terjadinya tumpang tindih peran, tugas, fungsi, serta kewenangan instansi pemangku kepentingan terkait.

Melalui buku Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut diharapkan seluruh pemangku kepentingan mengutamakan kepentingan nasional dan meninggalkan ego sektoralnya. Pemerintah juga layak mempertimbangkan institusi sipil nonmiliter yang memiliki multifungsi (single agency with multifunction) sebagaimana coast guard di beberapa negara di dunia — dan Bakamla RI telah siap untuk itu semua.

Buku tentang Mengamankan Laut :



Deskripsi Buku

Tata kelola pembangunan yang berkelanjutan adalah jawaban terhadap kebutuhan pemanfaatan masa kini dan kebutuhan generasi masa datang. Tata kelola sumber daya dan ruang maritim adalah isu yang kompleks dan membutuhkan peran semua pihak serta pendekatan kebijakan multidisiplin. Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan membutuhkan kemitraan dengan pemangku

kepentingan lain yang memiliki sumber daya, pengetahuan dan keahlian dalam mengelola ruang dan sumber daya maritim. Pemerintah juga membutuhkan dukungan, keterlibatan dan kontribusi dari kalangan praktisi, peneliti dan akademisi dari berbagai bidang ilmu di perguruan tinggi.

Buku ini diterbitkan atas kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Pusat Studi Pertahanan dan Keamanan (PUSHANKAM) UPN "Veteran" Yogyakarta.

Buku ini merupakan satu bagian dari upaya untuk mencapai dua tujuan, yakni memperkaya informasi dan pengetahuan tentang isu-isu kemaritiman dan menjaring masukan kebijakan bagi pemerintah dalam kebijakan tata kelola sumber daya dan penataan ruang maritim. Di masa depan, pemerintah akan tetap menerima masukan kebijakan yang dibutuhkan bagi perbaikan kebijakan pembangunan wilayah maritim nasional kita.

III. SIMPULAN & SARAN

1. SIMPULAN

Proyek perubahan sinergitas pengamanan perairan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Kalimantan Timur (IKN) merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran perairan di wilayah tersebut. Dalam upaya ini, berbagai komponen strategi telah dirancang dan akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut.

Proyek perubahan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan sinergitas dalam pengamanan perairan di sekitar ibu kota negara yang akan Kalimantan Timur. Seiring dengan berbagai upaya dan rencana strategis yang telah dan akan dilaksanakan maka implementasi proyek perubahan ini akan membawa dampak positif yang signifikan.

Proyek perubahan ini adalah bahwa sinergitas antar lembaga dan pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan dalam mengamankan perairan di sekitar ibu kota negara. Sinergitas ini mencakup kolaborasi erat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Proyek perubahan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan perairan yang lebih aman, berkelanjutan, dan sinergis di perairan ibu kota negara Kalimantan Timur. Implementasi langkah-langkah yang Implementasikan di dalam proyek perubahan ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. SARAN

- a. Dalam rangka pelaksanaan strategi jangka menengah dan jangka panjang memastikan keberlanjutan proyek perubahan ini perlunya dukungan dan komitmen bersama masing-masing Stakeholder baik dari Ditpolairud Polda Kaltim, Lanal Balikpapan maupun KSOP kelas 1 Balikpapan agar Implementasi Proyek Perubahan dapat terlaksana sesuai dengan target pelaksanaan.

- b. Dalam upaya meningkatkan keamanan perairan, penting untuk memperkuat kolaborasi antara semua pihak terkait, baik dari Ditpolairud Polda Kaltim, Lanal, KSOP dan pihak lainnya, dengan diselenggarakannya pertemuan rutin dan forum diskusi akan membantu meningkatkan pemahaman bersama, mengidentifikasi tantangan, dan merancang solusi yang efektif.
- c. Agar proyek perubahan ini terlaksana sesuai dengan target pelaksanaan maka perlu adanya peningkatan dukungan anggaran kegiatan pelaksanaa Patroli Perairan.

LAMPIRAN LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TIMUR



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 1904 /IX/DIK.2.5./2023

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka penunjukan sebagai mentor peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II T.A. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : Surat Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri Nomor: B/531/IX/DIK.2.5./2023/ Pusdikmin tanggal 4 September 2023 perihal penunjukan mentor peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : KOMBES POL PAHALA HM PANJAITAN, S.I.K., M.Si. NRP 70010196
DIRPOLAIRUD POLDA KALTIM
- Untuk : 1. melaksanakan bimbingan sebagai mentor peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023 atas nama AKBP BAHRIL, S.H. NRP 75020642, jabatan Kabagbinopsnal Ditpolairud Polda Kaltim dalam proyek perubahan;
2. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Balikpapan
pada tanggal : 11 September 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TIMUR



Tembusan:

1. Lemdiklat Polri.
2. As SDM Kapolri.
3. Irwasda Polda Kaltim.
4. Kabidpropam Polda Kaltim.



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Jalan Kiara Payung KM. 4,7 Jatinangor Sumedang Jawa Barat
Tlp. (022)7790048 Fax (022)7790055, Website: <http://bandung.lan.go.id>

**FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR
PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA
PKN TK II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023**

Nama Peserta : BAHRIL, S.H
NDH : 04
Instansi : DITPOLAIRUD POLDA KALTIM

Nama Mentor : PAHALA HOTMA MANGATUR PANJAITAN, S.I.K., M.Si
NRP : 70010196
Jabatan : DIRPOLAIRUD POLDA KALTIM
No. HP Mentor : 081380821991
Gagasan Perubahan : SINERGITAS PENGAMANAN PERAIRAN (SIPAMER) GUNA MENDUKUNG
PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA DI KALIMANTAN TIMUR

Balikpapan, 21 September 2023
Mentor


PAHALA H.M. PANJAITAN, S.I.K., M.Si.
KOMBES POL NRP 70010196

KOMITMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIRI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

Nama Peserta : BHRIL, S.H.
NDH : 04
Instansi : DITPOLAIRUD/POLDA KALTIM/POLRI

Nama Mentor : PAHALA H.M PANJAITAN, S.I.K., M.Si.
NIP/NRP : 70010196
Jabatan : DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALTIM
No HP Mentor : 0813-8082-1991

Nilai Akhir Sikap Perilaku: 7,93 (BAIK)

Pengembangan Kompetensi diri yang harus dilakukan oleh peserta Pada Aktualisasi Kepemimpinan dari proyek perubahan yaitu:

1. Memastikan jajaran Tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.
2. Merespon dengan positif adanya perbedaan atau kemajemukan dalam unit/tim kerja sehingga tetap fokus pada tujuan kerja yang disepakati.
3. Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan publik.

Demikian Komitmen Pengembangan Kompetensi Diri ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Disetujui Oleh :
Mentor


PAHALA H.M PANJAITAN, S.I.K., M.Si.
DIR POLAIRUD POLDA KALTIM

Balikpapan, September 2023
Peserta PKN II


BHRIL, S.H.
AKBP NRP 75020642

FORMULIR MENTOR

Nama Peserta : BAHRI, S.H.
 NRP : 75020642
 Jabatan : KABAGINOPSNAL
 Instansi : DITPOLAIRUD POLDA KALTIM
 Program : PKN II TAHUN 2023

Nama Mentor : PAHALA H.M PANJAITAN
 NRP : 70010196
 Jabatan : DIRPOLAIRUD POLDA KALTIM
 Instansi : DITPOLAIRUD POLDA KALTIM

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan	7
	2 Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis	7
	3 Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	8
	4 Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas	8
	5 Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	8
	6 Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta menyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	9
	JUMLAH	7.833
KERJASAMA	9 Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	7
	10 Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	8
	11 Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepatutnya pada langkah	8
	12 Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian	8
	13 Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target kerja	8
	JUMLAH	7.80

Dipindai dengan CamScanner

	JUMLAH	7.80
MENGELOLA PERUBAHAN	14 Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional.	8
	15 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala, dengan membuat unit kerja lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada baik saat ini maupun kedepannya.	8
	16 Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang, melaksanakan manajemen pembelajaran, memberikan evaluasi dan umpan balik	8
	17 Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja unit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik internal dan eksternal, agar	8
	18 Menjadi agent of change yang menginisiasi perubahan secara terencana meliputi planning, implementasi serta melakukan mitigasi resiko atas perubahan.	9
	JUMLAH	8.20

Disetujui Oleh :
 Mentor


 PAHALA H.M PANJAITAN, S.I.K., M.Si.
 DIR POLAIRUD POLDA KALTIM

KOMITMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIRI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

Nama Peserta : BAHRIL, S.H.
NDH : 04
Instansi : DITPOLAIRUD POLDA KALTIM

Nama Mentor : KOMBES POL PAHALA H.M PANJAITAN, S.I.K., M.Si.
NIP/NRP : 70010196
Jabatan : DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALTIM
No HP Mentor : 0813-8082-1991

Nilai Akhir Sikap Perilaku: 8.9 (BAIK)

Pengembangan Kompetensi diri yang harus dilakukan oleh peserta Pada Aktualisasi Kepemimpinan dari proyek perubahan yaitu:

1. Memastikan jajaran Tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.
2. Merespon dengan positif adanya perbedaan atau kemajemukan dalam unit/tim kerja sehingga tetap fokus pada tujuan kerja yang disepakati.
3. Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan publik.

Demikian Komitmen Pengembangan Kompetensi Diri ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Disetujui Oleh :
Mentor


PAHALA H.M PANJAITAN, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70010196

Balikpapan, November 2023
Peserta PKN II


BAHRIL, S.H.
AKBP NRP 75020642

FORMULIR MENTOR

Nama Peserta : BAHRIL, S.H.
 NRP : 75020642
 Jabatan : KABAGBINOPSNAL
 Instansi : DITPOLAIRUD POLDA KALTIM
 Program : PKN II TAHUN 2023

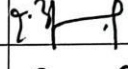
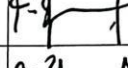
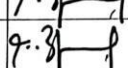
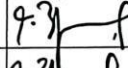
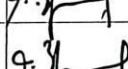
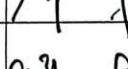
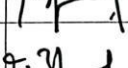
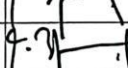
Nama Mentor : KOMBES POL PAHALA H.M PANJAITAN, S.I.K.,M.Si.
 NRP : 70010196
 Jabatan : DIRPOLAIRUD POLDA KALTIM
 Instansi : DITPOLAIRUD POLDA KALTIM

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan	9
	2 Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis	9
	3 Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	8
	4 Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas	9
	5 Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	9
	6 Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta menyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	9
	JUMLAH	8.833
KERJASAMA	9 Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	9
	10 Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	9
	11 Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepatutnya pada langkah	9
	12 Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian	9
	13 Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target kerja	9

**KARTU KENDALI PROSES MENTORING PKN TK. II
ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023**

Nama Peserta : BAHRI,SH
NDH : 04
Instansi : DITPOLAIRUD POLDA KALTIM

Nama Mentor : KOMBES POL PAHALA H.M PANJAITAN,SIK,M.Si

NO	Tanggal Mentoring	Isu/Permasalahan yang Dihadapi	Media Komunikasi	Hasil Mentoring	Tanda Tangan Mentor
1	04 sept 2023	Memberikan komitmen bersama	Tatap muka	Terciptanya komitmen Bersama peserta	
2	06 sept 2023	Memberikan arahan kepada peserta PKN II	Tatap muka	Arahan tentang judul proper	
3	09 sept 2023	Memberikan arahan tentang seminar rancangan proper	Telepon	Menunjuk Wadir sebagai wakil mentor	
4	20 sept 2023	Penandatanganan sprint Tim efektif	Tatap muka	Penandatanganan sprint Tim Efektif	
5	26 sept 2023	Arahan untuk koordinasi dengan Stakeholder	Telepon	Stakeholder unsur Maritim	
6	04 okt 2023	Surat undangan rapat penyusunan MoU	Tatap muka	Penandatanganan undangan MoU	
7	09 okt 2023	Arahan pembentukan Posko Simlayar	Tatap muka	Pembentukan Posko Simlayar	
8	24 okt 2023	Arahan persiapan penandatanganan MoU	Tatap muka	Persiapan penandatanganan MoU	
9	30 okt 2023	Penandatanganan Mou	Tatap muka	Penandatanganan MoU Bersama instansi terkait	
10	02 nov 2023	Arahan pembuatan surat patroli bersama	Tatap muka	Penandatanganan surat patroli bersama	
11	07 nov 2023	Patroli bersama	Tatap muka	Terlaksananya patroli bersama	
12	21 nov 2023	Arahan Penyusunan laporan proper	Tatap muka	Tersusunnya laporan proper	

*) Mentoring yang sah adalah yang sudah ditandatangani oleh Mentor

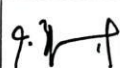
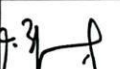
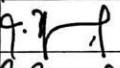
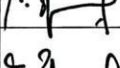
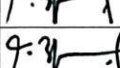
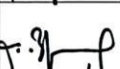
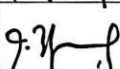
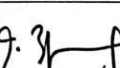
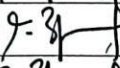
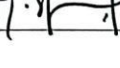
**KARTU KENDALI PROSES MENTORING PKN TK. II
ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023**

Nama Peserta : BAHRI,SH

Nama Mentor : KOMBES POL PAHALA H.M PANJAITAN,SIK,M.Si

NDH : 04

Instansi : DITPOLAIRUD POLDA KALTIM

NO	Tanggal Mentoring	Isu/Permasalahan yang Dihadapi	Media Komunikasi	Hasil Mentoring	Tanda Tangan Mentor
1	04 sept 2023	Membangun komitmen bersama	Tatap muka	Terwujudnya komitmen Bersama Mentor	
2	06 sept 2023	Konsultasi dengan Mentor selaku atasan langsung	Tatap muka	Konsultasi judul proper	
3	09 sept 2023	Koordinasi tentang seminar rancangan proper	Telepon	Penunjukan perwakilan mentor	
4	20 sept 2023	Pengajuan sprint Tim efektif	Tatap muka	Penandatanganan sprint Tim Efektif	
5	26 sept 2023	Konsultasi Stakeholder	Telepon	Identifikasi Satkeholder	
6	04 okt 2023	Pengajuan surat undangan rapat penyusunan MoU	Tatap muka	Penandatanganan undangan MoU	
7	09 okt 2023	Konsultasi pembentukan Posko Simlayer	Tatap muka	pembentukan posko Simlayer	
8	24 okt 2023	Konsultasi penandatanganan MoU	Tatap muka	Persiapan penandatanganan MoU	
9	30 okt 2023	Penandatanganan Mou	Tatap muka	Penandatanganan MoU Bersama instansi terkait	
10	02 nov 2023	Pengajuan surat patroli bersama	Tatap muka	Penandatanganan surat patroli bersama	
11	07 nov 2023	Patroli bersama	Tatap muka	Terlaksananya patroli bersama	
12	21 nov 2023	Konsultasi Penyusunan laporan proper	Tatap muka	Tersusunnya laporan proper	

*) Mentoring yang sah adalah yang sudah ditandatangani oleh Mentor

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : KOMBES POL PAHALA H.M PANJAITAN, S.I.K., M.Si

NRP : 70010196

Jabatan : DIRPOLAIRUD POLDA KALTIM

Nama : AKBP BAHRIL, SH

NRP : 75020642

Jabatan : KABAG BINOPSNAL DITPOLAIRUD POLDA KALTIM

Berkomitmen akan melanjutkan Proyek Perubahan tentang Sinergitas Pengamanan Perairan (SIPAMER) guna mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Peserta

BAHRIL, S.H.
AKBP NRP 75020642

Balikpapan, November 2023

Mentor


PAHALA H.M. PANJAITAN, S.I.K., M.Si
KOMBES POL NRP 70010196

**MOU / NOTA KESEPAHAMAN SINERGITAS PENGAMANAN PERAIRAN
(SIPAMER) GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA
DI KALIMANTAN TIMUR**



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

**PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT BALIKPAPAN**

DAN

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BALIKPAPAN

NOMOR : MoU/24/X/HUK.8.1.1./2023

NOMOR : B/709/X/2023

NOMOR : HK.201/1/17/KSOP.BPN 2023

TENTANG

**SINERGITAS PENGAMANAN PERAIRAN
GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA
DI KALIMANTAN TIMUR**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balikpapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini sebagai berikut :

1. KOMISARIS BESAR POLISI PAHALA H.M PANJAITAN, S.I.K., M.Si, selaku DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALIMANTAN TIMUR, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor: Sprin/2415/X/HUK.8.1.1./2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang pendelegasian penandatanganan Nota Kesepahaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (POLD KALTIM), berkedudukan dan berkantor di Jalan Syarifuddin Yoes No. 99 Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. KOLONEL

3.

4. KOLONEL LAUT (P) Dr. HENDRIMAN PUTRA, S.H., S.Tr.Han., M.Tr.Hanla., M.M., M.Sc., selaku KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT BALIKPAPAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT BALIKPAPAN, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.14 Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
5. Capt. BHARTO ARI RAHARJO, M.Si., selaku KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BALIKPAPAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BALIKPAPAN, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 1, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang melaksanakan tugas sebagai Tentara Nasional Indonesia matra laut dibidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum Internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

c. bahwa

- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan DLKr dan DLKp pelabuhan Balikpapan.
- d. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama dalam rangka sinergitas pengamanan perairan guna mendukung pembangunan ibu kota negara di kalimantan timur.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

7. Peraturan

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
8. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan TNI;

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Sinergitas Pengamanan Perairan Guna Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah terciptanya keterpaduan, efektivitas dan efisiensi dalam Kegiatan patroli bersama pengamanan perairan guna mendukung pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini guna terwujudnya kerja sama PARA PIHAK dalam rangka sinergitas pengamanan perairan guna mendukung pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

BAB II

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pengawasan dan pengamanan alur pelayaran perairan Ibu Kota Negara;
- b. kegiatan Patroli bersama di perairan Ibu Kota Negara;
- c. penanganan Pelanggaran dan Tindak Pidana;
- d. penanganan kejadian kecelakaan di perairan;
- e. pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan keamanan wilayah perairan Ibu Kota Negara; dan
- f. pemanfaatan saran dan prasarana.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pengamanan Alur Pelayaran Perairan Ibu Kota Negara

Pasal 3

- (1) Pemantauan situasi dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar, berlabuh jangkar dan pada saat sandar di pelabuhan atau *Jetty* di lingkungan DLKr dan DLKp pelabuhan Balikpapan.
- (2) pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan dermaga untuk sandar kapal patroli;
 - b. pemanfaatan kapal patroli beserta kelengkapannya; dan
 - c. pemanfaatan ruang sistem monitoring lalu lintas pelayaran.
- (3) pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) peningkatan peran serta pengguna alur pelayaran dalam membantu pengawasan alur perairan Ibu Kota Negara.

Bagian

Bagian Kedua
Kegiatan Patroli Bersama di Perairan Ibu Kota Negara

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK membuat jadwal/waktu dan rute patroli, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan (minggu ke 1 dan minggu ke 3).
- (2) Sebelum melaksanakan patroli, PARA PIHAK menentukan titik kumpul/*muster point*.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Patroli Bersama dengan:
 - a. PARA PIHAK menyiapkan minimal 1 unit kapal Patroli beserta Crew; atau
 - b. pelaksanaan patroli menggunakan 1 unit kapal patroli (secara bergantian) dengan Crew gabungan PARA PIHAK.
- (4) Melaksanakan kegiatan himbauan kepada pelaku usaha, pengguna alur pelayaran dan masyarakat pesisir tentang keamanan dan keselamatan pelayaran.
- (5) Melakukan pemeriksaan terhadap tempat, kapal, orang maupun barang yang patut dicurigai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penanganan Pelanggaran dan Tindak Pidana

Pasal 5

PARA PIHAK dalam melakukan penanganan pelanggaran dan tindak pidana, dilakukan melalui:

- a. mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP), barang bukti dan pelaku; dan
- b. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kewenangan PARA PIHAK.

Bagian

Bagian Keempat

Penanganan Kejadian Kecelakaan di Perairan

Pasal 6

PARA PIHAK dalam melakukan penanganan kejadian kecelakaan di perairan, dilakukan melalui:

- a. tindakan awal pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP)/Objek kecelakaan;
- b. melakukan pertolongan kepada korban;
- c. mengumpulkan informasi terkait kejadian kecelakaan tersebut; dan
- d. proses tindak lanjut/investigasi awal dilakukan oleh PIHAK KETIGA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pertukaran data dan informasi

Yang Berkaitan Dengan Keamanan Wilayah Perairan Ibu Kota Negara

Pasal 7

PARA PIHAK dalam melakukan pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan keamanan wilayah perairan Ibu Kota Negara, diantaranya berupa:

- a. data dan informasi situasi dan cuaca;
- b. data dan informasi kapal-kapal yang berlayar, Berlabuh jangkar dan pada saat sandar di Pelabuhan atau Jetty di lingkungan DLKr dan DLKp pelabuhan Balikpapan;
- c. data dan informasi daerah rawan kejahatan dan pelanggaran; dan
- d. data dan informasi hasil monitoring lalu lintas pelayaran.

Bagian

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan dan/atau menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam keadaan darurat, pemanfaatan sarana dan prasarana dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup, tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Wakil PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kabag Binopsnal Ditpolairud Polda Kaltim;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Pasops Lanal Balikpapan; dan
 - c. PIHAK KETIGA menunjuk Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli.

BAB V

BAB V
TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Pedoman Kerja Teknis (PKT) atau Rencana Kerja Teknis (RKT) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pedoman Kerja Teknis (PKT) atau Rencana Kerja Teknis (RKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim penyusun yang keanggotaannya berasal dari wakil-wakil PARA PIHAK.

BAB VI
ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Addendum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 14

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Nota

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 16

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Nota Kesepahaman ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/ kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya yang telah disepakati

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota kesepahaman, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik,
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

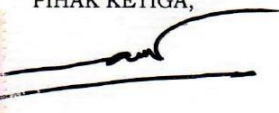
PIHAK PERTAMA,


PAHALA H.M PANJAITAN, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70010196

PIHAK KEDUA,


Dr. HENDRI MAN PUTRA, S.H., S.Tr.Han., M.Tr.Hanla., M.M., M.Sc.
KOLONEL LAUT (P) NRP 14824/P

PIHAK KETIGA,


Capt. BHARTO ARI RAHARJO, M.Si.
Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19760108 200502 1 002

JADWAL PATROLI BERSAMA

DITPOLAIRUD, LANAL, DAN KSOP

NOVEMBER 2023

- TGL 7 NOVEMBER 2023** { *Perairan Teluk Balikpapan*
Perairan Penajam
- TGL 27 NOVEMBER 2023** { *Perairan Bentang Panjang*
Perairan KKT

DESEMBER 2023

- TGL 7 DESEMBER 2023** { *Perairan Pantai Lango*
Perairan Dermaga IHM
- TGL 21 DESEMBER 2023** { *Perairan BUMDES*
Perairan Mentawir

JANUARI 2024

- TGL 4 JANUARI 2024** { *Perairan Teluk Balikpapan*
Perairan Penajam
- TGL 16 JANUARI 2024** { *Perairan Bentang Panjang*
Perairan KKT

FEBRUARI 2024

- TGL 7 FEBRUARI 2024** { *Perairan Pantai Lango*
Perairan Dermaga IHM
- TGL 22 FEBRUARI 2024** { *Perairan BUMDES*
Perairan Mentawir

MARET 2024

- TGL 5 MARET 2024** { *Perairan Teluk Balikpapan*
Perairan Penajam
- TGL 20 MARET 2024** { *Perairan Bentang Panjang*
Perairan KKT

Nomor: Sprin / 245 / X/HUK.8.1.1 / 2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Nota Dinas Dirpolairud Polda Kaltim Nomor: B/ND-92/X/DIK.2.5/2023/Ditpolairud tanggal 17 Oktober 2023 Perihal Permohonan pembentukan Pokja penyusunan MoU antara Ditpolairud Polda Kaltim, Danlanal Balikpapan dan KSOP Kelas I Balikpapan tentang sinergitas pengamanan perairan IKN.

Kepada : KOMBES POL PAHALA H.M PANJAITAN, S.I.K., M.Si. NRP 70010196
DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALTIM

Selesai.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
WAKA



Drs. MUJIYONO, S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL POLISI